

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Deskripsi Responden

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar secara daring menggunakan tautan *google form* kepada wajib pajak terkait. Kuesioner tersebut ditujukan kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang memiliki objek pajak PBB terdaftar di Kantor Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Total data yang berhasil diolah dalam penelitian ini sebanyak 138 kuesioner. Tingkat pengembalian kuesioner ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 16 Tingkat Pengambilan Kuesioner

Kriteria	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	150	
Kuesioner yang diisi	138	100%
Kuesioner yang tidak terisi	(12)	
Kuesioner yang dapat diolah	138 link	92%

Sumber: Data primer yang diolah, 2026

4.1.2 Karakteristik Responden

Demografi responden yang dianalisis pada kuesioner yang tercantum antara lain adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan

kepemilikan objek PBB. Demografi responden tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 17 Demografi Responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin	Perempuan	54	39%
	Laki-laki	84	61%
Usia	20-30 tahun	6	4%
	31-40 tahun	9	7%
	41-55 tahun	61	44%
	≥ 55 tahun	62	45%
Pendidikan	SMA	63	46%
	D3	9	7%
	D4/S1	63	46%
	Lainnya	3	2%
Pekerjaan	Pegawai Negeri (ASN/PNS)	9	7%
	Pegawai Swasta	32	23%
	Wiraswasta	59	43%
	Pensiunan	9	7%
	Lainnya	29	21%
Penghasilan per bulan	< Rp1.000.000	7	5%
	Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000	7	5%
	Rp 2.000.001 – Rp 3.500.000	30	22%
	Rp 3.500.001 – Rp 5.000.000	50	36%
	Rp5.000.001 – Rp 7.500.000	21	15%
	Rp 7.500.001 – Rp 10.000.000	11	8%
	> Rp 10.000.000	12	9%
Status Kepemilikan	Milik Sendiri	92	67%
	Sewa/Kontrak	6	4%
	Warisan	40	29%
Jenis Objek PBB	Rumah Tinggal	98	71%
	Tanah Kosong	2	1%
	Bangunan Usaha	38	28%
Memiliki SPPT PBB	Ya	138	100%
	Tidak	-	0%
Lama Memiliki/ Menempati Objek Pajak	1–5 tahun	11	8%
	6–10 tahun	18	13%
	11–15 tahun	38	28%
	16–20 tahun	7	5%

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Presentase
	> 20 tahun	64	46%
Kepemilikan NPWP	Ya	101	73%
	Tidak	37	27%

Sumber: Data primer yang diolah, 2026

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden didominasi oleh responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 61% (54 responden), sedangkan responden perempuan sebesar 39% (54 responden). Sementara itu pada daftar usia, mayoritas responden berusia lebih dari 55 tahun dengan total 62 responden (45%), kemudian disusul responden dengan usia 41–55 tahun sebanyak 61 responden (44%), responden usia 31–40 tahun sebanyak 9 responden (7%), dan responden paling sedikit adalah responden dengan usia 20–30 tahun sebanyak 6 responden (4%).

Dari segi pendidikan, responden terbanyak berlatar pendidikan SMA dan D4/S1 dengan jumlah yang sama, masing-masing sebanyak 63 orang (46%), kemudian disusul responden berpendidikan D3 sebanyak 9 orang (7%), dan lainnya sebanyak 3 orang (2%). Jika dilihat dari pekerjaan, mayoritas responden merupakan wiraswasta sebanyak 59 orang (43%), kemudian disusul dengan pegawai swasta sebanyak 32 orang (23%), lainnya sebanyak 29 orang (21%), serta pegawai negeri (ASN/PNS) dan pensiunan masing-masing sebanyak 9 orang (7%).

Dari segi penghasilan per bulan, responden paling banyak berpenghasilan Rp3.500.000 – Rp5.000.000 sebanyak 50 orang (36%), diikuti Rp2.000.000 – Rp3.500.000 sebanyak 30 orang (22%), Rp5.000.000 – Rp7.500.000 sebanyak 21 orang (15%), lebih dari Rp10.000.000 sebanyak 12 orang (9%), kemudian disusul dengan penghasilan Rp7.500.000 – Rp10.000.000 sebanyak 11 responden (8%),

serta masing-masing sebanyak 7 orang (5%) untuk kelompok penghasilan kurang dari Rp1.000.000 dan Rp1.000.000 – Rp2.000.000.

Terkait status kepemilikan objek pajak, mayoritas responden memiliki objek pajak atas nama sendiri sebanyak 92 orang (67%), diikuti dengan status warisan sebanyak 40 orang (29%), dan sewa/kontrak sebanyak 6 orang (4%). Jenis objek PBB yang paling banyak dimiliki adalah rumah tinggal sebanyak 98 orang (71%), disusul bangunan usaha sebanyak 38 orang (28%), dan tanah kosong sebanyak 2 orang (1%). Seluruh responden sebanyak 138 orang telah memiliki SPPT PBB.

Dari segi lama memiliki/menempati objek pajak, mayoritas responden telah menempatinnya selama lebih dari 20 tahun sebanyak 64 orang (46%), diikuti 11-15 tahun sebanyak 38 orang (28%), 6-10 tahun sebanyak 18 orang (13%), diikuti 1–5 tahun sebanyak 11 orang (8%), dan 16–20 tahun sebanyak 7 orang (5%). Terakhir, terkait kepemilikan NPWP, sebanyak 101 responden (73%) tercatat memiliki NPWP, sedangkan sisanya sebanyak 37 responden (27%) tidak memiliki NPWP.

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data objek penelitian. Berikut adalah hasil penelitian statistik deskriptif terhadap berbagai variabel yang diuji pada penelitian ini meliputi variabel tingkat kesadaran wajib pajak (TKP) sebagai variabel independen, variabel kepatuhan wajib pajak (KWP) sebagai variabel dependen, variabel Sanksi Sosial (SP) sebagai variabel moderasi.

Tabel 4. 18 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Median	Mean	Std. Deviation
TKP	138	8	30	21	21.2391	4.99716
SP	138	7	30	22	21.5362	4.64060
KWP	138	10	25	17	17.9130	3.80641

Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Pada tabel 4.3 menampilkan jumlah sampel (n) dalam penelitian ini yakni 138 sampel kuesioner. Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa nilai mean rentang aktual variabel TKP sebesar 21,2391 dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai median yaitu 21. Nilai rata-rata sebesar 21,24 dari skor maksimal 30 mencerminkan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran wajib pajak yang cukup baik, yakni sekitar 70,8% dari skor maksimal, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan.

Selanjutnya, nilai mean rentang aktual variabel KWP sebesar 17,9130 dengan nilai median sebesar 17. Hal ini berarti nilai mean yang sedikit lebih tinggi dari median menunjukkan distribusi data sedikit miring ke kanan. Rata-rata skor sebesar 17,91 dari maksimal 25 atau sekitar 71,6% mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak responden tergolong cukup baik. Sementara untuk variabel SP memiliki nilai mean rentang aktual sebesar 21,5362 dengan nilai median sebesar 22. Nilai median yang sedikit lebih tinggi dibandingkan mean mengindikasikan bahwa distribusi data sedikit miring ke kiri, yang berarti sebagian besar responden cenderung memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap sanksi sosial. Rata-rata skor sebesar 21,54 dari maksimal 30 atau sekitar 71,8% mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sanksi sosial sebagai sesuatu yang cukup tegas dan

memberikan efek jera, meskipun nilai minimum yang rendah (7) menunjukkan masih ada sebagian kecil responden yang menilai sanksi sosial kurang berpengaruh.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1. Uji Kualitas Data

4.3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner dalam penelitian ini (Ghozali, 2021). Data dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Validitas juga dapat dilihat dari nilai signifikansi, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka indikator pertanyaan dinyatakan valid.

Berikut temuan uji validitas yang didapat:

Tabel 4. 19 Hasil Uji Validitas

Variabel	item	Pearson Correlation	R tabel	Sig.	Keterangan
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	X1	0.896	0.1406	0.000	VALID
	X2	0.884	0.1406	0.000	VALID
	X3	0.887	0.1406	0.000	VALID
	X4	0.88	0.1406	0.000	VALID
	X5	0.896	0.1406	0.000	VALID
	X6	0.868	0.1406	0.000	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0.888	0.1406	0.000	VALID
	Y2	0.886	0.1406	0.000	VALID
	Y3	0.882	0.1406	0.000	VALID
	Y4	0.865	0.1406	0.000	VALID
	Y5	0.875	0.1406	0.000	VALID
Sanksi Sosial	Z1	0.880	0.1406	0.000	VALID
	Z2	0.881	0.1406	0.000	VALID
	Z3	0.877	0.1406	0.000	VALID
	Z4	0.847	0.1406	0.000	VALID
	Z5	0.874	0.1406	0.000	VALID
	Z6	0.871	0.1406	0.000	VALID

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

4.3.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Ghozali (2021) digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden pada kuesioner. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS dengan metode *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$

Tabel 4. 20 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan	Reliabel/Tidak
TK	0.944	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> $> 0,70$	Reliabel
KP	0.926	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> $> 0,70$	Reliabel
SP	0.937	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> $> 0,70$	Reliabel

Note:

TK = Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

KP = Kepatuhan Wajib Pajak

SP = Sanksi Sosial

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi data yang normal atau tidak (Ghozali, 2021). Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila memperoleh nilai signifikansi $\geq 0,05$.

Tabel 4. 21 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		138
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	
	Std. Deviation	1.86386964
Most Extreme Differences	Absolute	0.063
	Positive	0.063

	Unstandardized Residual
Negative	-0.043
Test Statistic	0.063
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200c,d

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* pada tabel 4.6, diperoleh nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas, karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$).

4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel bebas (independen) dalam model regresi (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi di antara variabel independen dengan syarat nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , maka model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas. Berikut hasil pengujian multikolinearitas.

Tabel 4. 22 Hasil Uji Multikolonearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	0.914	1.094
Sanksi Sosial	0.914	1.094

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *tolerance* yang berada di atas 0,10 serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang kurang dari 10,00. Oleh karena itu, variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (TKP) dan Sanksi Sosial (SP) dinyatakan tidak memiliki masalah multikolinearitas.

4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan *variance* residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Suatu model regresi dikatakan baik apabila tidak mengalami heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi koefisien parameter variabel independen lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021). Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glesjser*.

Tabel 4. 23 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.958	0.576	3.396	0.001
	TKP	-0.022	0.021	-0.091	-1.014 0.313
	SP	-0.003	0.023	-0.013	-0.144 0.886

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 4.8, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan variabel independen dan variabel moderasi memiliki nilai probabilitas signifikansi yang lebih besar dari 0,05.

4.3.3. Uji Non-Response Bias

Uji *non response* bias memastikan bahwa responden yang mengisi kuesioner (responden awal) tidak berbeda secara signifikan dengan yang tidak mengisi (responden akhir), sehingga hasil penelitian tetap dapat digeneralisasi.

Tabel 4. 24 Hasil Uji Non Response Bias

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means		
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
TKP	Equal variances assumed	0.158	0.692	0.353	68	0.725
	Equal variances not assumed			0.353	67.931	0.725
SP	Equal variances assumed	0.848	0.36	1.345	68	0.183
	Equal variances not assumed			1.345	66.364	0.183
KWP	Equal variances assumed	0.63	0.43	1.166	68	0.248
	Equal variances not assumed			1.166	67.547	0.248

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji *non-response* bias menggunakan *Independent Sample T-Test*, diperoleh hasil signifikansi *Levene's Test* untuk variabel tingkat kesadaran wajib pajak (TKP) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,692, variabel Sanksi Sosial (SP) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,360, dan variabel kepatuhan wajib pajak (KWP) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,430. Seluruh nilai signifikansi *Levene's Test* pada ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05, yang berarti varians antara kelompok responden awal (*early*) dan responden akhir (*late*) adalah homogen atau sama.

Selanjutnya, hasil *t-test for Equality of Means* pada baris *Equal variances assumed* menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) untuk variabel tingkat kesadaran wajib pajak (TKP) sebesar 0,725, variabel Sanksi Sosial (SP) sebesar 0,183, dan variabel kepatuhan wajib pajak (KWP) sebesar 0,248. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok responden awal dan responden akhir pada semua variabel penelitian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat *non-response bias* dalam penelitian ini.

4.3.4. Uji Hipotesis

4.3.4.1. Hasil Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Penggunaan uji ini bertujuan untuk mengetahui peran sanksi sosial sebagai variabel moderasi dalam memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara tingkat kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak PBB. Hasil dari analisis regresi moderasi tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Interpretasi Persamaan Regresi Model Pertama

Tabel 4. 25 Hasil Uji Persamaan Regresi Model Pertama

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.367	0.779		5.606	0
	TKP	0.638	0.036	0.837	17.858	0

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Dari tabel tersebut menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP_1 = \alpha + \beta_1 TKP + \varepsilon$$

$$KWP_1 = 4,367 + 0,638.TKP + \varepsilon$$

- a. Nilai konstanta sebesar 4,367 dapat diartikan bahwa apabila variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (TKP) bernilai nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB (KWP) tetap bernilai sebesar 4,367.
- b. Koefisien regresi variabel sebesar 0,638 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (TKP) akan diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak PBB (KWP) sebesar 0,638 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak bersifat searah, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

2. Interpretasi Persamaan Regresi Model Kedua

Tabel 4. 26 Hasil Uji Persamaan Regresi Model Kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	25.164	2.266		11.104	0
	TKP	-0.599	0.109	-0.786	-5.491	0
	SP	-0.985	0.111	-1.201	-8.9	0
	TKP*SP	0.057	0.005	2.44	11.1	0

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Dari tabel tersebut menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP_2 = \alpha + \beta_1TKP + \beta_2SP + \beta_3TKP*SP + \varepsilon$$

$$KWP_2 = 25,164 - 0,599.TKP - 0,985.SP + 0,057.TKP*SP + \varepsilon$$

- a. Nilai konstanta sebesar 25,164 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak PBB akan bernilai sebesar 25,164.
- b. Koefisien variabel interaksi TKP*SP diperoleh sebesar 0,057 dengan arah positif, yang berarti bahwa sanksi sosial memperkuat pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Dengan kata lain, semakin tinggi sanksi sosial yang diberlakukan, maka pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

4.3.4.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan guna mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 yang diperoleh, maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen, begitu juga sebaliknya.

Tabel 4. 27 Hasil Koefisien Determinasi (R^2) Model Pertama

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837a	0.701	0.699	2.08889

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, diperoleh Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,699 menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (TKP) mampu menjelaskan sebesar 69,9% variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB (KWP), sedangkan sisanya sebesar 30,1%

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Tabel 4. 28 Hasil Koefisien Determinasi (R²) Model Kedua

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.935a	0.875	0.872	1.36030

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Kemudian, pada regresi model kedua memiliki diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,872 menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (TKP), Sanksi Sosial (SP), dan variabel interaksi TKP*SP secara bersama-sama mampu menjelaskan sebesar 87,2% variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB (KWP), sedangkan sisanya sebesar 12,8% merupakan pengaruh dari variabel lain.

4.3.4.3. Hasil Uji Signifikansi Parameter Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji ANOVA. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel serta melihat tingkat signifikansinya. Hasil uji ANOVA dinyatakan signifikan apabila nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 29 Hasil Uji F Model Pertama

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1391.524	1	1391.524	318.903	.000b
	Residual	593.433	136	4.363		
	Total	1984.957	137			

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA di atas, diperoleh nilai F-hitung lebih besar dari F tabel yaitu $318,903 > 3,91$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi pertama bisa digunakan untuk memperkirakan pengaruh secara simultan dari variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (TKP) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB (KWP).

Tabel 4. 30 Hasil Uji F Model Kedua

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1737.000	3	579.000	312.901	.000b
	Residual	247.957	134	1.850		
	Total	1984.957	137			

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA di atas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 312,901 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Nilai F-hitung (312,901) juga lebih besar dari F-tabel (2,67), yang berarti bahwa model regresi kedua bisa digunakan untuk memperkirakan pengaruh secara simultan dari variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (TKP), Sanksi Sosial (SP), dan variabel interaksi TKP*SP terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB (KWP).

4.3.4.4. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individu / Uji Parsial (T)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 31 Hasil Uji Statistik-t Model Pertama

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.367	0.779		5.606	0
	TKP	0.638	0.036	0.837	17.858	0

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji t pada model regresi pertama, variabel Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (TKP) memperoleh nilai t hitung sebesar 17,858 lebih besar dari t tabel sebesar 1,656 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang mendandakan adanya pengaruh variabel tingkat kesadaran wajib pajak (TKP) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (KWP).

$$KWP_1 = 4,367 + 0,638.TKP + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil uji hipotesis 1 mengenai pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pbb, ditunjukkan melalui tabel 4.16 Terlihat bahwa hasil signifikansi variabel tingkat kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 dan koefisien positif yakni 0,638. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Oleh karena itu, temuan tersebut sejalan dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga **H1 didukung**

Tabel 4. 32 Hasil Uji Statistik-t Model Kedua

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.164	2.266		11.104	0
	TKP	-0.599	0.109	-0.786	-5.491	0
	SP	-0.985	0.111	-1.201	-8.9	0
	TKP*SP	0.057	0.005	2.44	11.1	0

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji t pada model regresi kedua, variabel interaksi TKP*SP memperoleh nilai t-hitung sebesar 11,100 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,656 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menandakan adanya pengaruh variabel interaksi tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB (KWP).

$$KWP_2 = 25,164 - 0,599.TKP - 0,985.SP + 0,057.TKP*SP + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh hasil uji hipotesis kedua mengenai moderasi sanksi sosial pada pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, ditunjukkan melalui tabel 4.17 Terlihat bahwa hasil signifikansi variabel interaksi TKP*SP sebesar 0,000 dan koefisien positif yakni 0,057. Disimpulkan bahwa sanksi sosial terbukti memperkuat pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Temuan tersebut sejalan dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sanksi sosial secara positif memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga **H2 didukung**.

4.4 Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil menerangkan hasil uji dari kedua hipotesis yang telah diajukan. Berikut tabel ringkasan hasil uji kedua hipotesis pada penelitian ini:

Tabel 4. 33 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Tingkat kesadaran wajib pajak secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak	H1 Didukung
H2	Sanksi sosial secara positif memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	H2 Didukung

4.4.1. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib pajak

Hipotesis pertama pada penelitian ini mengatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak secara positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB. Temuan riset menunjukkan bahwa nilai rata-rata aktual yang cukup tinggi pada variabel tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang cukup baik serta kecenderungan yang besar untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2. Hal ini menggambarkan bahwa wajib pajak yang memahami bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa perlu adanya paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, hipotesis pertama didukung dengan hasil temuan data empiris.

Theory of Planned Behavior (TPB) sejalan dengan penelitian ini, dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Jika dihubungkan dengan aspek penelitian ini, sikap terhadap perilaku menggambarkan pandangan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, apakah dipandang sebagai sesuatu yang penting atau tidak. Wajib pajak yang memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan akan cenderung memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, sehingga mendorong kepatuhan dalam membayar PBB. Oleh karena itu, komponen sikap terhadap perilaku dalam TPB berkaitan erat dengan variabel tingkat kesadaran wajib pajak (TKP) dalam penelitian ini.

Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Rahmayanti *et al.* (2020), Nasiroh & Afiqoh (2023), Alfianto (2024) menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakannya maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan negara dan daerah. Riset yang dilakukan oleh Anur *et al.* (2024) turut mendukung temuan riset ini bahwa. Menurut riset yang dilakukan oleh Takaria & Sudjiman (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan dorongan dari dalam diri wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara, sehingga kesadaran serta kepatuhan dalam membayar PBB-P2 sangat dibutuhkan. Oleh karena itu

pemerintah perlu terus meningkatkan strategi dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan negara.

4.4.2. Peran Sanksi Sosial dalam Memoderasi Pengaruh Tingkat

Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi sosial secara positif memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hasil riset menunjukkan bahwa nilai rata-rata aktual variabel sanksi sosial pajak cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa responden mempersepsikan sanksi sosial yang diterapkan cukup tegas dan memberikan efek jera. Berdasarkan konteks penelitian ini, Sanksi Sosial difokuskan pada sanksi sosial berupa penempelan plang tunggakan PBB dan pengumuman penunggak pajak di ruang publik. Mekanisme sanksi sosial ini menciptakan rasa malu yang mendorong wajib pajak untuk tidak ingin diketahui oleh masyarakat sekitar sebagai penunggak pajak, sehingga semakin memperkuat motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis kedua didukung dengan hasil temuan data empiris.

Temuan ini sejalan dengan pandangan *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada komponen norma subjektif yang berkaitan dengan tekanan sosial yang dirasakan serta dorongan untuk mengikuti pandangan kelompok, dimana dalam konteks penelitian ini berhubungan dengan variabel Sanksi Sosial (SP). Sanksi sosial perpajakan seperti penempelan plang tunggakan PBB dan pengumuman penunggak pajak di ruang publik menciptakan tekanan sosial yang mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

karena rasa malu yang timbul akibat diketahui oleh masyarakat sekitar sebagai penunggak pajak menjadi faktor pendorong yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Namun demikian, penelitian ini hanya mengadopsi dua dari tiga komponen *Theory of Planned Behavior* (TPB), yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yang direpresentasikan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan norma subjektif (*subjective norm*) yang direpresentasikan oleh variabel sanksi sosial pajak. Komponen ketiga, yaitu kontrol yang dirasakan (*perceived behavioral control*), tidak dimasukkan sebagai variabel tersendiri dalam model penelitian ini. Lebih lanjut, sanksi sosial perpajakan dalam memengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak menjadi kunci penting dalam penelitian ini, di mana ketika sanksi sosial diterapkan secara efektif maka kesadaran wajib pajak akan semakin meningkat karena mereka tidak hanya mempertimbangkan risiko administratif semata, tetapi juga risiko sosial berupa rusaknya reputasi dan citra diri di hadapan lingkungan sosialnya.

Jika dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa temuan ini didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh Cahyaning *et al.* (2024), Putri & Nadi (2024), Herlita *et al.* (2025) dimana sanksi sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut riset lain yang dilakukan oleh Asyegap & Badjuri (2025) sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena keberadaan sanksi sosial semakin memperkuat motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena mereka memahami pentingnya menaati aturan serta risiko yang timbul apabila melakukan pelanggaran.